

13-90-173

## AMANAT

### KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PADA UPACARA DIES NATALIS PTIK KE-44 DAN WISUDA SARJANA PTIK ANGKATAN XXV 18 JUNI 1990

Dewan Guru Besar yang saya hormati,

Para sesepuh dan pinisepuh POLRI dan Bhayangkari.

Saudara Gubernur PTIK, Dekan PTIK serta segenap sivitas Akademika,

Para undangan yang saya hormati

Penyelenggaraan upacara pada hari jadi PTIK ke-44 tahun ini bertepatan dengan dimasukinya dasa warsa terakhir dari abad kedua puluh yang merupakan penggal waktu diambang awal abad kedua puluh satu dengan segala kerumitan yang diramalkan akan terjadi dalam berbagai segi kehidupan manusia.

Dengan periodisasi dasa warsa yang mengawali amanat saya ini, dimaksudkan untuk sekedar memudahkan ilustrasi kita terhadap tuntutan bagi lembaga ilmiah seperti PTIK ini, yang pada garis besarnya diminta untuk memberikan respons terhadap lingkungan yang berkembang terus dengan cirinya yang berubah menurut rentang waktu tertentu.

Begitu pula apabila saya sebut dengan abad kedua puluh satu sebenarnya merupakan salah satu metode belaka untuk mengingatkan bahwa sikap yang dituntutkan kepada lembaga ilmiah adalah sikap mawas ke depan, agar dengan demikian segenap sivitas akademika ini dalam pola berpikirnya senantiasa berada selangkah lebih maju di depan orang lain bahkan senantiasa berada selangkah lebih awal sebelum saat datangnya permasalahan.

Hal ini menjadi perlu saya garis bawahi mengingat apabila tuntutan pokok tadi tidak dapat dipenuhi, bisa jadi lembaga ini akan kehilangan peranannya sebagai intellectual power yang seharusnya mampu bertindak sebagai subjek dalam pembangunan, dan bukan sebaliknya sebagai follower belaka dalam arti sekedar menjadi objek dari proses pembaharuan.

Oleh karena itu di saat-saat peringatan hari jadi PTIK seperti ini tepatlah kiranya apabila thema sentralnya senantiasa berisikan sikap

mawas diri terutama mawas ke dalam dengan mencoba untuk selalu bertanya kepada diri sendiri apakah terhadap tuntutan pokok tadi telah dipenuhi dalam perjalanan usia lembaga yang cukup panjang ini.

Sikap mawas ke dalam seperti ini menjadi perlu kita lakukan sebab betapa pun juga ukuran mangkus dan sangkilnya suatu lembaga ilmiah akan senantiasa diukur dari seberapa besar kepeloporannya dalam olah pikir dan apakah dalam cara pemecahan terhadap masalah yang digelarkan telah memiliki tingkat kesepadanan dalam memberikan jawaban terhadap perkembangan lingkungan yang terus berubah tadi.

Karena itu dalam kedudukannya sebagai lembaga ilmiah kiranya akan semakin memiliki integritas dan jati dirinya secara mapan apabila dalam proses pendewasaannya tidak hanya sekedar bertumpu pada kemegahan gedung serta kebesaran gelar-gelar akademis yang disandangkan kepada para alumnusnya. Sebab semuanya itu barulah menunjukkan adanya potensi-potensi yang harus dikembangkan menjadi "output riil" dalam memberikan jawaban terhadap tantangan jaman.

Bukankah adagium "IVORY TOWER" telah lama kita tinggalkan bahkan terhadap "science for the sake of science" pun telah lama pula kita waspadai dalam penerapannya. Demikian pula dalam lingkungan POLRI bahkan mulai

dikikis berkembangnya "etos label" yang mewarnai hadirnya produk massal dalam pembentukan kader kepemimpinan intelektual POLRI.

Apa yang saya kemukakan tadi hendaknya semakin menyadarkan kepada kita semua bahwa mengagungkan nama lembaga ilmiah tidaklah dapat dilakukan dengan sekedar sanjungan dan segala utopia yang steril dari kenyataan-kenyataan empirik, namun sebaliknya harus dijawab dengan karya-karya ilmiah yang mampu menjamah permasalahan-permasalahan yang melekat di dalam kenyataan empirik tersebut.

Semua ini kiranya perlu kita tujukan kepada ilmu kepolisian sendiri dalam kedudukannya sebagai applied science yang jelas secara langsung akan dihadapkan kepada masalah-masalah soal yang begitu luas dimensinya sehingga memberikan sifat pada pekerjaan polisi sebagai serba berurusan dengan masyarakat. Dalam kaitan inilah banyak pakar-pakar ilmu kepolisian di dunia ini yang secara tajam mengantisipasi perkembangan masalah kepolisian di masa datang seperti dikemukakan oleh William L. Tafoya yang mengatakan "in the society of the future we shall undertake this work of social hygiene, and thereby we shall remove the epidemic of criminality". Begitu pula Joseph F. Sheley menyatakan bahwa penuntasan masalah-masalah kejahatan dalam arti

luas harus mencakup pula upaya penciptaan terhadap apa yang disebut dengan kondisi freedom from social constraint.

Pernyataan-pernyataan tersebut kiranya telah sejajar dengan wawasan POLRI terhadap kamtibmas yang disesuaikan dengan perkembangan lingkungan sosial pada dewasa ini. Dimana kejahatan dengan segala dimensinya yang meluas dan meningkat pada dasarnya hanyalah merupakan spektrum terujung dari suatu proses interaksi sosial yang mengendap dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan kata lain kejahatan hanyalah sekedar sebagai gejala yang muncul di tingkat hilir dari suatu aliran panjang yang berawal dari tingkat hulu, berupa akar-akar patologis yang membaaur dalam masyarakat.

Kenyataan seperti inilah yang mematangkan tumbuhnya wawasan POLRI yang memandang bahwa gejala-gejala faktual merupakan titik terujung dari proses sistemik dari dinamika ancaman yang bergerak sejak dari gejala-gejala potensial berupa police hazard, faktor korelatif kriminogin dan sumber ancaman untuk kemudian didinamisir oleh adanya faktor-faktor stimulan. Oleh karena itu paham tindakan kepolisian yang semula hanya terdiri dari represif dan preventif saja saat ini tidak lagi mampu mewadahi kebutuhan bagi penuntasan masalah-masalah kepoli-

sian yang begitu luas sehingga pada gilirannya diperlukan upaya-upaya pre-emptive. Hal ini berarti bahwa paham pencegahan yang bertumpu pada usaha peniadaan niat dan kesempatan belaka tidak lagi mampu membendung arus dinamika ancaman, yang ternyata menuntut bagi dilakukannya upaya penataan sejak dari proses interaksi sosial yang padat dengan akar-akar sosial patologis sampai pada kasus-kasus berdimensi baru.

Langkah-langkah penataan seperti inilah yang dimaksud sebagai upaya pre-emptive yaitu upaya pengosongan atau eliminasi terhadap akar-akar sosial patologis sebagai akibat adanya ketidak serasian dalam penataan di berbagai sektor kehidupan dan sektor pembangunan, agar tidak tumbuh dan berkembang lebih jauh.

Menghadapi luasnya dimensi ancaman tersebut tentunya diperlukan berbagai cabang keahlian ilmu kepolisian yang mampu mengimbangi kecenderungan masyarakat yang semakin diversifikatif, dan keahlian tersebut tentunya diharapkan dapat menjelma ke dalam bentuknya sebagai spesialisasi-spesialisasi kemampuan terapan dari cabang ilmu kepolisian sendiri; agar dengan demikian ilmu kepolisian akan semakin tegar dalam menemukan bentuknya sebagai ilmu yang multidisipliner.

Tuntutan seperti inilah yang harus mampu dijawab oleh PTIK sebagai lembaga ilmiah pendukung

POLRI, sekaligus merupakan upaya PTIK dalam meleburkan dirinya ke dalam sistem pendidikan nasional tanpa meninggalkan keterikatannya dengan sistem pendidikan ABRI yang nota bene merupakan sub sistem dari pendidikan nasional.

Yang saya maksud dengan meleburkan diri ke dalam suatu sistem bukanlah sebagai sekedar melakukan pekerjaan yuridis berupa penjabaran terhadap undang-undang sisdiknas belaka, namun justru harus menata substansi dari sistem tersebut berupa ilmu pengetahuan dan keahlian-keahlian yang harus digelarkan. Karena itu apabila kita memandang definisi ilmu kepolisian dari visualisasi science tree-nya belaka kiranya tidaklah cukup, sebab hal tersebut harus dilanjutkan ke dalam proses transformasinya sampai dapat menghadirkan sederetan keahlian ilmu kepolisian yang mampu memecahkan masalah-masalah kepolisian itu sendiri.

Apa yang telah saya kemukakan tadi bukanlah dimaksudkan agar diadakan pembahasan-pembahasan lebih lanjut yang biasanya hanya mampu menghasilkan deskripsi yang berkepanjangan belaka, namun wajib dipedomani sebagai kebijakan pimpinan yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu yang singkat. Sebab sebagai pengguna utama atau sebagai konsumen pertama dari keahlian ilmu kepolisian saat ini POLRI telah dihadapkan kepada tantangan-tan-

tangan yang mendesak terutama dalam rangka mengawal kiprah pembangunan nasional yang segera akan mengantarkan bangsa Indonesia untuk memasuki masyarakat industri dan paska industri.

Menghadapi tantangan seperti ini disamping menuntut kepekaan POLRI terhadap potensi-potensi gangguan kamtibmas yang berkembang sebagai dampak dari urbanisasi, industrialisasi, perkembangan growth-growth centre dan juga derasny arus informasi yang melanda dunia, namun juga menuntut bagi dilakukannya penataan-penataan internal yang diarahkan guna memantapkan profesionalisasi POLRI sebagai persiapan menuju modernisasi kepolisian.

Untuk itulah disamping kesiapan dan kesiagaan operasional POLRI serta dalam keterpaduannya dengan supra struktur pengendalian kamtibmas dan penyiapan kesamaptaan infra struktur penanggulangan kriminalitas, kepada kita pun tetap dituntut agar mampu menyelenggarakan pembinaan tenaga manusia dan sumber daya yang lebih police oriented lagi. Bahkan dalam jangka sedang ini POLRI pun harus mampu pula mengikis sikap-sikap non profesional yang dalam kenyataannya justru merupakan aspek cultural organizations yang paling dominan yang hakekatnya dapat menghambat proses pemantapan terhadap profesionalisasi POLRI itu sendiri.

Semua ini jelas merupakan pekerjaan besar yang menuntut gaya management inovatif serta dilandasi oleh adanya sikap pandang terhadap prestasi sebagai etos kerja dalam setiap penggelaran daya manjerial dan kepemimpinan POLRI; dalam kiprah seperti inilah lembaga PTIK tentunya akan dituntut agar mampu menjadi pelopor dan unsur dinamisatornya. Bahkan dalam mewujudkan pekerjaan besar seperti yang saya kemukakan tadi segenap sivitas akademika haruslah merasa terpanggil untuk mengemban tanggung jawab moral dan profesional dalam gelora semangat yang terpancar dari sikap kejuangannya sebagai prajurit pejuang dan pejuang prajurit.

Terlebih lagi kepada para wisudawan yang sebentar lagi akan diterjunkan ke segenap jajaran POLRI sebagai tunas-tunas baru inti kepemimpinan POLRI haruslah mampu menunjukkan kesanggupannya mengemban misi POLRI jauh ke masa datang. Untuk itu disamping harus mampu menyandang gelar kesarjanaannya secara konsekuen namun juga harus mampu mempertanggungjawabkannya ke dalam kiprah peningkatan kualitas POLRI secara keseluruhan.

Dalam rangka inilah kemampuan untuk menjalin hubungan kerja sama dengan masyarakat ilmiah kepolisian yang terhimpun dari segenap potensi masyarakat khususnya dari pada cendekiawan perlu terus di-

tingkatkan.

Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Prof. Dr. Juwono Soedarsono yang telah berkenan menyajikan Dies Rede pada upacara hari jadi PTIK ke-44 ini. Kita semua mengetahui sekalipun beliau dalam sehari-hari tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan perkuliahan di PTIK namun beliau tetap menempatkan diri sebagai pemeran aktif dalam ikut membangun ilmu kepolisian bagi kemajuan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Untuk itu sekali lagi atas nama pimpinan ABRI dan segenap jajaran POLRI saya menyampaikan terima kasih.

Mudah-mudahan segenap curahan pemikiran dan upaya yang kita lakukan bagi kemajuan ilmu kepolisian ini dapat memberikan kemanfaatan secara nyata bagi upaya peningkatan kualitas pengabdian POLRI di masa-masa mendatang, terutama dalam memberikan suatu jawaban terhadap tantangan jaman dan perjuangan bangsa dalam mewujudkan masyarakat tata tentram kertaraharja berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan taufiq dan ridho-Nya kepada kita sekalian serta berkenan menuntun langkah pengabdian kita terutama dalam usaha ikut mewujudkan keadilan,

Kebenaran dan ketentraman sebagaimana yang kita dambakan bersama.

Sekian dan dirgahayu PTIK

Jakarta, 18 Juni 1990  
Kepala Kepolisian Republik  
Indonesia

Drs. Moch. Sanoesi  
Jenderal Polisi

**MARKAS BESAR  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
INDUK KOPERASI**

Jl. Tambak No. 2 Telp. 331330, 331332, 331334  
Jakarta 10320

mengucapkan :

**SELAMAT**

**HUT BHAYANGKARA KE-44**

**1 JULI 1990**

**A.n. Pengurus Inkoppol beserta  
Unit-unit Usahanya :**

1. Unit Bhara Niaga : Export Import.
2. Unit Bhara Kerta : Percetakan
3. Unit Bhara Sajah : Penyaluran Barang
4. Unit Bhara Jasa Pendidikan dan Ketrampilan: Kursus Ketrampilan
5. Unit SSB : SIM Polarold
6. Unit PNKB : Pembuatan Plat Nomor Kendaraan Bermotor
7. Proyek Gula Kelapa : Produksi Gula Kelapa
8. PT. Bharakons Pratama: Konstruksi Bangunan
9. PT. B T T S : Travel Service
10. PT. Bhara Techno Nusantara : Sistim Pengamanan